

## BAB VI

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata dengan mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi, dimana luas wilayah yang tidak terlalu besar menjadi suatu masalah penting yang menarik untuk dibahas dan diperhatikan dalam permasalahan sampah. Dimana masalah persampahan di Kota Bukittinggi yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi masalah fatal yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang diatur oleh pihak Leading Sector yang berwenang yaitu DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata merupakan kota yang mempunyai masalah yang fatal dalam persampahan, dimana Kota Bukittinggi mempunyai jumlah tingkat volume sampah yang masih tinggi dibanding Kota dan Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, persoalan ini menjadi hal krusial yang perlu dibahas. Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kota Bukittinggi, maka harus dilakukannya peningkatan pengelolaan persampahan dengan DLH sebagai pihak Leading Sector melakukan proses program-program pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dalam melakukan proses program-program pemberdayaan masyarakat tersebut, ada beberapa aktor yang terlibat seperti DLH Kota Bukittinggi, Dinas Pengelolaan Pasar Unit Pasar Bawah, Satpol PP, RT/RW, Masyarakat, agar proses tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang

optimal dengan adanya bantuan. Program pemberdayaan masyarakat yang diadakan seperti Sosialisasi, Pengomposan, Budidaya Rumah Magot, Sosialisasi Adiwiyata, Program Kampung Iklim, dan Proyek dari Bappenas. Kota Bukittinggi sudah menerapkan program-program tersebut, sehingga pengelolaan dari masalah persampahan sudah mulai berjalan dengan baik. Tetapi, masih ada satu program yang belum berjalan dengan rutin seperti pada program kampung iklim sehingga masih minimnya hasil yang dicapai dari program tersebut. Hal ini disebabkan karena masih minimnya publikasi dari pihak yang berwenang kepada masyarakat sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program tersebut. Walaupun begitu, jika diadakan suatu perlombaan, DLH sebagai pihak yang berwenang memberikan sosialisasi pelatihan khusus terhadap program yang diadakan, sehingga Kota Bukittinggi tetap menjalankan program-program pemberdayaan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Menurut teori Ife Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat dalam masalah persampahan, maka Kota Bukittinggi sudah menerapkan program-program sesuai dengan variabel yang ada dalam teori tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah mulai berjalan dengan baik. Dalam teori ife chambers dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah maka ada 4 variabel untuk menganalisa pada fenomena yang ditemukan di lapangan, dimana yang sudah ditemukan tersebut sudah memenuhi 4 variabel tersebut dengan cara mengukur dari beberapa indikator, namun ada beberapa indikator dan variabel

yang dijalankan tersebut belum terlalu maksimal yang disebabkan dari beberapa faktor, seperti masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang dan belum adanya anggaran tetap beberapa program.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, peneliti memberikan saran, antara lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi sebagai pihak Leading Sector yang berwenang mengelola masalah pelayanan retribusi dan persampahan dalam mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota yang mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat lebih ditingkatkan lagi dalam proses pengelolaan persampahan agar tetap menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang terkemuka di Sumatera Barat.
- b. Dalam menjalankan proses program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pihak yang berwenang terus melakukan peningkatan dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan secara rutin agar pemahaman masyarakat lebih tinggi mengenai program-program yang diberikan oleh DLH Kota

Bukittinggi sebagai pihak yang berwenang.

c. Pada proses pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan program yang diadakan oleh DLH Kota Bukittinggi terus di pertahakan dan ditingkatkan supaya mencapai hasil yang lebih baik.

d. Bagi Masyarakat, Sebaiknya pemerintah daerah serius mempromosikan, sosialisasikan, dan mengadakan lomba agar Masyarakat mengerti, paham dan mulai menerapkan pemberdayaan yang dilakukan untuk memulai pengolahan dari hal yang sederhana seperti pelaksanaan pemilahan sampah basah sampah kering, pemilahan sampah daur ulang dan tidak daur ulang, sehingga pemberdayaan yang dilakukan ini memang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan Masyarakat.

e. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, pelaksanaan pemberdayaan ini tidak hanya terhadap pelaksanaan sosialisasi saja sepanjang tahun, namun dapat sekiranya dari tahun ke tahun langkah nyatanya semakin banyak dan beragam mulai dari memperbanyak dan melengkapi sarana fasilitas dan prasarana sehingga Masyarakat semakin tertarik untuk berpartisipasi, pembaharuan program dan banyak inovasi lainnya yang dapat

ditawarkan kepada Masyarakat agar bisa pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan secara berkesinambungan tidak putus di Tengah waktu pelaksanaan saja.

- f. Bagi Kelurahan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak DLH, RT, RW dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, ikut serta dan berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang ke TPS.

